

Peran Media Sosial dalam Membangun Opini Publik: Studi Kasus Akun Media Sosial DPR RI

Yohanes William¹, Riris Loisa^{2*}

¹Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: yohanes.915210126@stu.untar.ac.id

²Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta*
Email: ririsl@fikom.untar.ac.id

Masuk tanggal ; 20-12-2024, revisi tanggal 25-01-2025, diterima untuk diterbitkan tanggal: 21-02-2025

Abstract

This study aims to answer questions about how the Indonesian House of Representatives' social media contributes to shaping public opinion on legislative policies. Data was obtained through in-depth interviews with the Indonesian House of Representatives' social media managers and content analysis of posts on X (Twitter), Instagram, TikTok, and YouTube. The results of the study show that social media plays a significant role in increasing transparency, encouraging public participation, and strengthening policy literacy through interactive two-way communication. However, challenges such as negative comments and the spread of misinformation remain major obstacles. To overcome these challenges, adaptive and data-driven communication strategies are needed to manage emerging issues. This study shows that social media is an effective strategic tool for disseminating legislative policies and encouraging active public involvement in the legislative process. These findings highlight the importance of optimising social media as a means of building constructive relationships between parliament and the public.

Keywords: communication strategies, legislative policies social media, public opinion, public participation, transparency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kontribusi media sosial DPR RI dalam membangun opini public terkait kebijakan legislatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola media sosial DPR RI serta analisis konten unggahan di platform X (Twitter), Instagram, TikTok, dan YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi, mendorong partisipasi publik, dan memperkuat literasi kebijakan melalui komunikasi dua arah yang interaktif. Kendati demikian, tantangan seperti komentar negatif dan penyebaran misinformasi masih menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi komunikasi yang adaptif dan berbasis data guna mengelola isu-isu yang muncul. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial merupakan alat strategis yang efektif untuk menyosialisasikan kebijakan legislatif serta mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses legislasi. Temuan ini menyoroti pentingnya optimalisasi media sosial sebagai sarana membangun hubungan yang konstruktif antara parlemen dan masyarakat.

Kata Kunci: kebijakan legislatif, media sosial, opini publik, partisipasi publik, strategi komunikasi, transparansi,

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat modern dalam mencari dan memanfaatkan pengetahuan. Media sosial, sebagai bagian dari media baru, menawarkan kemudahan akses dan penggunaannya yang praktis. Kini, individu dengan mudah dapat memanfaatkan media sosial untuk mencari, memperoleh, serta mendistribusikan informasi, termasuk informasi politik, yang berperan penting dalam membentuk opini publik dan memicu diskusi politik yang konstruktif.

Media sosial memiliki peran signifikan dalam menyampaikan informasi dengan cepat dan efisien, termasuk edukasi mengenai isu-isu penting seperti tindakan korupsi. Pertumbuhan jaringan masyarakat yang pesat telah memfasilitasi penyebaran informasi dalam skala besar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai sumber informasi. Menurut laporan *We Are Social* (2022), jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2022 mencapai 191 juta, meningkat 12,53% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern.

Sebagai sarana komunikasi massa, media sosial memungkinkan interaksi dan komunikasi yang lebih luas. Dengan didukung perangkat komunikasi praktis seperti ponsel pintar dan koneksi internet nirkabel, media sosial mempermudah akses informasi dari berbagai pihak, termasuk individu, media, dan pemerintah. Informasi yang disebarluaskan mencakup berbagai isu seperti pelayanan publik, pembangunan, masalah sosial dan politik, serta kebijakan pemerintah. Beberapa lembaga pemerintah dan kepala daerah bahkan aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat (Kota & Yovinus, 2018).

Media sosial juga bertransformasi menjadi alat penting dalam memengaruhi dinamika politik suatu negara. Di era masyarakat yang semakin melek teknologi, penyampaian aspirasi melalui media sosial menjadi tren yang signifikan. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap aspirasi rakyat, mengingat partisipasi publik merupakan elemen utama dalam demokrasi. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi medium komunikasi, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah (Abduh & Cangara, 2022).

Namun, di balik perannya yang progresif, kebebasan berpendapat melalui media sosial tidak jarang menghadapi tantangan. Beberapa regulasi dianggap membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan pribadi. Kendati demikian, media sosial tetap menjadi platform penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan demokrasi.

Penting untuk mengetahui bagaimana peran media sosial DPR RI dalam membangun opini publik mengenai kebijakan lembaga legislatif dan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan media sosial dalam membangun opini publik terhadap kebijakan lembaga legislatif. Menjelaskan bagaimana media sosial digunakan oleh pemerintah sebagai alat komunikasi untuk menyosialisasikan kebijakan kepada masyarakat (Latifah et al., n.d.).

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam studi komunikasi politik, khususnya peran media sosial dalam pendapat publik. Secara Praktis yaitu memberikan wawasan kepada lembaga legislatif dan lembaga lain terkait pentingnya pemanfaatan media sosial dalam menyampaikan kebijakan publik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami berbagai fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengumpulan data deskriptif berupa narasi, cerita, dan interpretasi, yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen (Wekke, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mencakup berbagai tahapan seperti penyusunan proposal, pengumpulan data di lapangan, pengembangan hipotesis, hingga analisis dan penyusunan laporan hasil penelitian. Pendekatan ini menekankan pada pengolahan data yang bersifat non-numerik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif situasional, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, analisis konten, metode snowball, serta pemanfaatan narasi atau cerita sebagai bagian dari proses analisis data.

Penelitian ini menerapkan metode studi kasus, yaitu pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena tertentu pada individu, organisasi, atau komunitas dalam konteks kehidupan nyata. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami karakter holistik dan makna suatu peristiwa melalui proses observasi, wawancara, serta analisis data yang mendalam. Studi kasus sering digunakan untuk menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” suatu peristiwa terjadi, sehingga sangat relevan untuk penelitian di bidang sosial, politik, dan hukum yang bersifat kontemporer (Qurotianti, 2018).

Objek penelitian ini adalah konten yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, khususnya DPR RI, yang dipublikasikan melalui platform seperti website, X (Twitter), Instagram, YouTube, dan TikTok. Pemilihan platform ini didasarkan pada popularitasnya sebagai media yang paling sering diakses oleh pengguna media sosial. Platform tersebut dipilih karena keunggulannya dalam menyajikan informasi terkini dengan cepat, keterhubungan antar pengguna dari berbagai kalangan, serta kemampuan untuk menghadirkan topik-topik yang sedang tren. Selain itu, media sosial ini memungkinkan interaksi publik melalui fitur seperti kolom komentar, quote retweet, dan mention, yang membuka ruang untuk diskusi.

Subjek penelitian ini adalah para pengelola akun media sosial, khususnya yang bertanggung jawab atas akun media sosial DPR RI. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pengelola tersebut untuk menggali informasi secara lebih rinci mengenai bagaimana peran media sosial digunakan dalam membentuk opini publik.

3. Hasil Temuan dan Diskusi

Pentingnya Media Sosial sebagai Alat Strategis di DPR RI

Saat ini, media sosial telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung edukasi dan penyebaran informasi mengenai kebijakan legislasi yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Fungsi utama media sosial adalah untuk menyosialisasikan dan mempublikasikan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada publik. Selain itu, media sosial juga berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang telah dirancang dan diterapkan oleh DPR bersama pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat valid, sehingga mereka dapat memahami konteks dan isi kebijakan

tersebut dengan lebih baik. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara DPR dan masyarakat, dengan menyajikan informasi yang terstruktur, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Menyadari pergeseran perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital, DPR RI memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan komunikasi.

Teori komunikasi politik yang diajukan oleh Lasswell (1927) menjelaskan bahwa komunikasi politik dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan "Siapa yang mengatakan apa kepada siapa melalui saluran apa dengan efek apa?". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPR RI, melalui akun media sosialnya, telah berhasil memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi politik. Dengan menggunakan berbagai fitur interaktif seperti komentar, retweet, dan live streaming, media sosial memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara lembaga legislatif dan masyarakat.

Narendra, pengelola media sosial, menyebutkan bagaimana media sosial menjadi alat penyebaran informasi yang hampir bisa diakses oleh masyarakat.

"Karena saat ini tuh media sosial itu tidak bisa dipikiri bahwa hampir 80% lebih penduduk Indonesia itu sudah menggunakan media sosial. Karena kita saat ini sudah mulai memiliki bonus demografi, di mana kalangan Gen Z dan kalangan milenial saat ini kan sangat banyak ya. Dan mereka itu sudah menggunakan media sosial itu di setiap hal. Itu peran media sosial saat ini."

Fakta ini juga sejalan dengan fenomena bonus demografi yang sedang dialami Indonesia, di mana generasi Z dan milenial mendominasi jumlah penduduk. Kedua generasi ini sangat terampil dalam menggunakan media sosial dan menjadikannya sebagai sarana utama untuk mengakses informasi sehari-hari.

Menyediakan Platform untuk Aspirasi dan Diskusi

DPR RI, melalui media sosial, telah meluncurkan berbagai program inovatif untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menyediakan ruang bagi partisipasi dan diskusi publik. Salah satu program tersebut adalah Janet, sebuah inisiatif yang memungkinkan masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi mereka melalui komentar atau tulisan di media sosial, yang kemudian akan ditanggapi oleh pihak yang berwenang. Selain itu, DPR RI juga memanfaatkan fitur media sosial seperti Live Instagram untuk mengadakan diskusi interaktif secara langsung antara masyarakat dan anggota Dewan.

Hasil penelitian ini mendukung teori demokrasi partisipatif yang diajukan oleh Barber (1984), yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan. Media sosial telah menjadi sarana yang efektif untuk menciptakan ruang bagi partisipasi tersebut. DPR RI, melalui program seperti "Janet" yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung di media sosial, telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif.

Temuan ini juga menunjukkan bagaimana fitur media sosial, seperti kolom komentar dan siaran langsung, memfasilitasi komunikasi dua arah antara lembaga legislatif dan masyarakat. Partisipasi ini tidak hanya mencakup pemberian masukan, tetapi juga pengawasan terhadap kinerja lembaga legislatif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif, yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses demokrasi.

Peran Media Sosial DPR RI dalam Edukasi dan Penyebaran Informasi

Media sosial telah diakui sebagai alat yang sangat strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kota & Yovinus (2018), yang menyatakan bahwa media sosial mempermudah akses masyarakat terhadap informasi kebijakan publik, meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi publik. Dalam konteks penelitian ini, DPR RI memanfaatkan media sosial untuk memberikan penjelasan yang mendalam mengenai kebijakan yang sedang dibahas, seperti rancangan undang-undang, melalui konten yang bersifat edukatif dan informatif.

Sebagai contoh, melalui akun media sosial DPR RI (X, TikTok, YouTube, Instagram), DPR RI menyampaikan informasi mengenai kegiatan legislatif secara langsung, yang memungkinkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan kebijakan secara real-time. Informasi yang disampaikan mencakup proses legislasi, hasil rapat, hingga klarifikasi mengenai isu-isu kontroversial. Hal ini mendukung temuan penelitian Susanto (2017) yang menyebutkan bahwa media sosial berperan sebagai alat pendukung jaringan komunikasi politik yang efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik melalui komunikasi dua arah yang interaktif. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini, yang menunjukkan bahwa DPR RI memanfaatkan platform media sosial untuk menciptakan ruang bagi diskusi publik, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan. Dengan memfasilitasi komunikasi yang lebih langsung dan transparan, media sosial memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dan memiliki suara dalam proses pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2017) mengungkapkan bahwa media sosial memberikan kemudahan dan kecepatan dalam menyebarkan pesan politik. Temuan ini juga tercermin dalam hasil penelitian ini, di mana DPR RI secara aktif memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi kebijakan dengan cepat, serta menjangkau audiens yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda.

Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana untuk Meningkatkan Transparansi

Hasil penelitian ini menyoroti betapa pentingnya peran media sosial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif. Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abduh & Cangara, 2022) yang menyatakan bahwa lembaga legislatif dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk membuka akses informasi secara lebih transparan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini, DPR RI memanfaatkan media sosial sebagai saluran untuk menyampaikan berbagai informasi yang relevan dengan kebijakan dan kegiatan legislatif. Salah satu contohnya adalah siaran langsung rapat komisi yang dapat diakses melalui platform media sosial. Langkah ini merupakan bukti nyata dari upaya DPR RI untuk meningkatkan tingkat keterbukaan informasi dan memberikan akses langsung kepada masyarakat untuk mengikuti proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih memahami dinamika kebijakan yang sedang dibahas dan memastikan bahwa lembaga legislatif dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

DPR RI memiliki frekuensi publikasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lainnya di Indonesia dalam hal penggunaan media sosial. Berdasarkan penuturan narasumber, DPR RI sangat proaktif dalam mengelola media sosial dengan tujuan utama untuk memastikan informasi yang disampaikan

kepada publik tetap terjaga kelancarannya dan tidak terhenti. Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi dan memastikan masyarakat selalu mendapatkan informasi yang akurat serta terbaru mengenai kegiatan DPR, termasuk rapat, kunjungan kerja, dan acara penting lainnya.

Tingginya frekuensi publikasi ini merupakan bagian dari strategi komunikasi yang diterapkan oleh DPR RI, yang berbeda dengan pendekatan media mainstream yang sering kali hanya menyoroti satu berita utama. Dalam upayanya untuk mencapai keterbukaan dan transparansi, DPR RI berusaha untuk mempublikasikan sebanyak mungkin kegiatan yang berlangsung, termasuk rapat-rapat atau acara-acara yang diadakan di lapangan. Dengan cara ini, setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPR RI, baik itu rapat resmi maupun kegiatan lainnya, selalu disajikan melalui platform media sosial DPR RI.

Namun, tantangan yang muncul dari tingginya volume konten ini adalah potensi kebingungan di kalangan publik akibat banjir informasi. Terlalu banyak informasi dapat membuat publik kesulitan untuk membedakan antara yang penting dan yang kurang relevan, yang berisiko menimbulkan kebingungan atau bahkan kesalahan persepsi publik.

Untuk mengatasi masalah ini, tim media sosial DPR RI merencanakan untuk melakukan rekapitulasi bulanan terhadap seluruh konten yang telah dipublikasikan. Setiap bulan, semua konten yang telah diproduksi akan dievaluasi dan dirangkum dalam bentuk epografi atau kombinasi konten yang menggambarkan kinerja Dewan selama periode tersebut, serta isu-isu yang menjadi perhatian publik. Rencana ini, yang akan diterapkan pada tahun 2025, bertujuan untuk lebih memfokuskan publikasi pada isu-isu yang menjadi perhatian utama masyarakat dan menghindari kebingungan akibat informasi yang berlebihan.

Tantangan dan Pengelolaan Isu

Temuan penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh DPR RI dalam mengelola isu-isu negatif yang berkembang di media sosial. Dalam menghadapi tantangan ini, DPR RI menerapkan strategi yang cukup terstruktur, seperti melakukan analisis mendalam terhadap komentar-komentar negatif yang muncul, serta menangani isu-isu tersebut dengan cara yang proporsional. Strategi ini menggambarkan bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai alat untuk meredam keresahan publik dan menjaga citra lembaga legislatif di mata masyarakat.

Pendekatan yang digunakan oleh DPR RI ini sejalan dengan pandangan (Qurotianti, 2018), yang menekankan pentingnya melakukan analisis data yang mendalam dalam manajemen isu, untuk dapat memahami dinamika percakapan publik dan meresponsnya dengan lebih tepat dan efektif. Dengan menggunakan strategi yang berbasis data dan adaptif, DPR RI berusaha menjaga hubungan yang konstruktif dengan masyarakat, meskipun terkadang muncul tantangan terkait persepsi atau kontroversi yang berkembang di ruang digital.

Narendra menyebutkan contoh kasus isu kontroversial seperti penggantian gorden rumah jabatan DPR. “Contoh misalkan kalau yang dulu-dulu itu yang itu jadi keresahan publik itu Gorden misalnya dulu kita pernah mau beli, mau ganti gorden di rumah jabatan anggota.”

Tim media sosial DPR RI melakukan analisis yang komprehensif untuk memahami dengan lebih mendalam sumber keresahan yang muncul di kalangan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu-isu negatif yang tersebar di media sosial. Dengan pendekatan yang berbasis data, tim ini berusaha untuk mengidentifikasi

faktor-faktor yang memicu ketidakpuasan publik dan reaksi negatif terhadap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh DPR. Berdasarkan hasil analisis tersebut, mereka kemudian memberikan klarifikasi yang lebih tepat dan relevan untuk mengatasi kebingungannya, serta meredakan ketegangan yang mungkin timbul.

Pendekatan berbasis data ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang terinformasi dan terukur sangat penting dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital, di mana informasi dapat dengan cepat tersebar luas dan kadang kali melahirkan reaksi yang beragam. Dengan menggunakan data sebagai dasar untuk memahami opini publik dan mengarahkan respons yang sesuai, DPR RI dapat menjaga kualitas komunikasi yang lebih transparan dan akurat. Hal ini tidak hanya membantu meredakan keresahan publik, tetapi juga meningkatkan efektivitas komunikasi antara lembaga legislatif dan masyarakat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses legislasi yang sedang berlangsung.

Dampak Positif Media Sosial Terhadap Keterlibatan Publik

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Platform media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam dialog dan diskusi mengenai kebijakan publik yang sedang dibahas. Hal ini mendukung temuan dari penelitian oleh (Latifah et al., n.d.), yang menyatakan bahwa media sosial memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan kebijakan, dengan memberi mereka platform untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, atau bahkan memberikan masukan langsung kepada pihak yang berwenang.

Dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti X, Instagram, YouTube, dan TikTok, DPR RI berhasil memperluas jangkauan komunikasinya ke audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda yang sangat aktif di dunia digital. Selain itu, penggunaan platform ini juga memungkinkan DPR RI untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang dapat menyuarakan pendapat mereka, berdiskusi, dan berinteraksi dengan anggota Dewan. Melalui media sosial, DPR RI tidak hanya mampu menyampaikan informasi mengenai kegiatan legislatif, tetapi juga mendorong keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk berperan lebih aktif dalam proses pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

4. Simpulan

Media sosial telah menjadi alat strategis dan sarana efektif bagi DPR RI dalam memperkuat komunikasi, transparansi, dan partisipasi publik terkait kebijakan legislatif. Dengan memanfaatkan platform seperti X, Instagram, YouTube, dan TikTok, DPR RI mampu menyampaikan informasi secara real-time dan interaktif, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang sedang dibahas. Media sosial juga berfungsi sebagai sarana transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses proses legislasi, hasil rapat, dan klarifikasi terhadap isu-isu kontroversial, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Selain itu, media sosial juga memainkan peran edukatif dengan memberikan informasi yang mendalam mengenai kebijakan legislatif serta menciptakan ruang

partisipatif melalui diskusi langsung dan program interaktif. Ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses legislasi. Namun, tantangan utama yang dihadapi DPR RI adalah mengelola opini publik, terutama komentar negatif dan hoaks yang dapat merusak citra lembaga. Untuk itu, DPR RI menerapkan strategi komunikasi yang terarah, termasuk analisis mendalam terhadap isu negatif, guna memastikan penyebaran informasi yang akurat dan mengurangi potensi kebingungannya. Keseluruhan, media sosial berperan penting dalam membangun opini publik, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan mendorong keterlibatan aktif dalam kebijakan legislatif, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan DPR RI dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika komunikasi digital.

5. Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, narasumber, serta pihak-pihak yang terlibat sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Daftar Pustaka

- Abduh, I. M., & Cangara, H. (2022). *Kritik Sosial Kebijakan Pemerintah Dalam Platform Media Sosial Dengan Pendekatan Komunikasi Hyperpersonal* (Vol. 8, Issue 1).
- Annisa Rizky Fadilla, P. A. W. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1, 34–46.
- Augina, A., Program, M., Ilmu, S., Masyarakat, K., Kedokteran, F., Kesehatan, I., Jambi, U., Letjend, J., No, S., 33, T., & Pura, J. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Dat Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat. In *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* (Vol. 12).
- Handika, R., & Azmi, A. (2020). Marketing Politik Calon Legislatif Generasi Milenial (Strategi Pemenangan Manufer Putra Firdaus Dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Padang Tahun 2019). In *Journal Of Civic Education* (Vol. 3, Issue 1).
- Hasfi, N. (2019). Komunikasi Politik Di Era Digital. In *Jurnal Ilmu Politik* (Vol. 10, Issue 1).
- Kota, D., & Yovinus, B. (2018). Peran Komunikasi Publik Media Sosial Dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. In *Jurnal Academia Praja* (Vol. 1).
- Latifah, K. N., Fatma, &, & Najicha, U. (N.D.). Implikasi Media Sosial Terhadap Formulasi Kebijakan Publik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Marinu, W. Magister, M. W., Pendidikan, A., Kristen, U., & Wacana, S. (N.D.). *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*.
- Lukas, S. Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian Jurusan Ekonomi Manajemen, P., Musianto Staf Pengajar, L. S., Ekonomi Dan Fakultas Komunikasi, F., & Kristen Petra, U. (N.D.). *Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian*. [Http://Puslit.Petra.Ac.Id/Journals/Management/](http://Puslit.Petra.Ac.Id/Journals/Management/)
- Qurotianti, A. (2018). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Menerapkan Pelayanan Prima Di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Studi Kasus

- Di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). In *Jurnal Ikatan Pustakawan Indonesia* (Vol. 3, Issue 1).
- Susanto, E. H. (2017). Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik. *Jurnal Aspikom*, 3(3), 379–398.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Gawe Buku: Yogyakarta